PERENCANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENCEGAHAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019

Oleh: Syarifah Vena Melinda

Email: venasyarifah@gmail.com

Dosen Pembimbing: Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

The problem of flooding in Pekanbaru City is caused by river overflow due to obstruction of the flow of the Siak River to the sea caused by tides, causing an increase in the level of the Siak River. Meanwhile, those caused by rainfall are due to accumulated garbage and the amount of sand sediment in the drainage / drainage channel so that if there is rain the water flow will be hampered. Weather factors and the effects of climate change that trigger an erratic rainy season cannot be blamed but must be addressed by the government with adequate urban planning. Pekanbaru City Government does not have a Master Plan for flood prevention and water catchment areas for the long term. In addition, there is urban planning that reduces the absorption of water to the ground, such as semenising sidewalks. The formulation of this research is "How is the planning and what are the inhibiting factors of the Public Works and Spatial Planning Service in Flood Prevention in Pekanbaru City in 2019?"

This study aims to analyze, identify and describe the planning and inhibiting factors of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office in Flood Prevention in Pekanbaru City in 2019. This research is a descriptive type of research using a qualitative approach. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation, data analysis used is qualitative analysis.

The findings that can be concluded are the Planning of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Agency in 2019 in Flood Prevention through 5 stages of the development planning process: 1. Planning, there are obstacles such as not having a Flood Prevention Master Plan due to budget constraints so that the resolution of the flood problem is not optimal; 2. Programming, construction of sheet pile/talud/brojong, normalization of rivers and streams, and rehabilitation/maintenance of primary and secondary channels and bridges in flood prevention in Pekanbaru City; 3. Implementation of plans, the obstacles are not maximal implementation of programs and activities due to budget rationalization and not maximal drainage maintenance officers in carrying out their duties; 4. Supervision, supervises every program and activity carried out and reports any irregularities that occur and takes corrective action; 5. Evaluation, evaluating flood prevention development, one of the forms is a revidesign.

Keywords: Development Planning, Flood Prevention, Master Plan.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Banjir yang sering terjadi di beberapa bagian di dunia termasuk Indonesia, merupakan peristiwa alam yang tidak dapat dicegah. Peristiwa banjir merupakan akibat dari berbagai sebab. Misalnya hujan deras dan lama serta kondisi daerah pengaliran sungai yang tidak mampu menahan air hujan, akan menimbulkan aliran permukaan yang besar. Bila palung sungai tidak mampu lagi menampung aliran permukaan yang besar, terjadilah banjir. Faktor penyebab terjadinya banjir, diantaranya adalah:

- 1) Curah hujan pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan.
- 2) Kapasitas drainase yang tidak memadai hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota tersebut sering menjadi sasaran musim banjir.
- 3) Disiplin masyarakat untuk membuang sampah ke sungai. Di kota-kota besar hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan sampah di aliran sungai dapat meninggikan permukaan air sehingga terjadi banjir karena menghalangi aliran air sungai.
- 4) Lahan drainase perkotaan dan pengembangan lahan pertanian pada daerah rawan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi (Wahyudha, Skripsi, 2018: 5).

Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pencegahan Bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Dalam hal mengatasi persoalan banjir melalui rencana pembangunan pemerintah daerah merupakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Provinsi Riau termasuk wilayah yang sering terkena banjir. Khususnya di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru, banjir rutin terjadi setiap tahun. Terjadinya genangan air setiap setelah hujan, jika pengaliran air terhambat akan menjadi banjir. Banjir merupakan permasalahan serius yang harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ada 3 kecamatan di Kota Pekanbaru rawan banjir yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Rumbai (Riaupagi.com, 12 November 2018). Berikut jumlah lokasi banjir di Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2019:

Tabel 1
Jumlah Titik Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019

No	Karakteristik Penyebab Banjir	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Luapan Sungai Siak	2	2	2
2	Curah Hujan	35	37	39
Total		37	39	41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2019.

Permasalahan banjir di Kota Pekanbaru disebabkan oleh luapan sungai karena terhambatnya aliran sungai Siak ke laut yang disebabkan oleh pasang air laut, sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air sungai Siak. Sedangkan yang disebabkan oleh curah hujan karena sampah yang menumpuk dan banyaknya endapan pasir di drainase/saluran pembuangan air sehingga jika terjadi hujan aliran air akan terhambat.

Karakteristik penyebab banjir yang disebabkan oleh luapan sungai Siak dari segi kondisi bangunan di permukaan tanah di sekitar pinggiran sungai Siak lebih rendah dibandingkan permukaan air Sungai Siak sehingga rawan terhadap banjir. Ketinggian permukaan bangunan yang ada di pinggiran sungai Siak masuk dalam kategori permukaan air banjir sungai Siak. Contohnya pembangunan Perumahan Witayu tidak direkomendasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dianggap tidak layak karena dekat dengan sungai Siak. Ada siklus banjir perlima (5) tahun, persepuluh (10) tahun, perlimapuluh (50) tahunan. Perumahan Witayu ini masuk ke dalam banjir persepuluh tahun. Ketika banjir 10 tahun terjadi kondisi sungai Siak meluap sampai ke Perumahan Witayu. Solusi dari permasalahan tersebut masyarakat pindah ke tempat lain. Karakteristik penyebab banjir yang disebabkan oleh curah hujan, jumlah penduduk mempengaruhi terjadinya banjir dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk semakin banyak pula bangunan, sehingga daerah resapan air semakin berkurang.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa banjir terjadi disebabkan oleh dua kejadian, pertama disebabkan oleh luapan sungai Siak, kedua disebabkan oleh hujan (rutin). Lokasi rawan banjir setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2017 sejumlah 37 titik, kemudian tahun 2018 sejumlah 39 titik dan tahun 2019 sejumlah 41 titik.

Banjir di Kota Pekanbaru disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, drainase tidak berfungsi dengan baik dikarenakan adanya sumbatan (Riauonline.co.id, 16 Juni 2019). Menurut dosen Teknik Perencanaan Wilayah Kota dari Universitas Islam Riau mengatakan banjir di Kota Pekanbaru tergolong banjir lokal dan luapan Sungai Siak. Faktor cuaca dan pengaruh perubahan iklim yang memicu musim hujan tidak menentu, tidak bisa disalahkan melainkan harus disikapi pemerintah dengan perencanaan tata kota

yang memadai. Kemudian pemerintah setempat tidak memiliki perencanaan drainase dan daerah serapan air untuk jangka panjang. Selain itu, ada perencanaan tata kota yang memperkecil daya serap air ke tanah seperti semenisasi trotoar (Antaraneews.com, 22 Juni 2019).

Dalam Perda Kota Pekanbaru No. 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru tahun 2005-2025, Pada ayat 8 Menjadi prioritas utama pembangunan sistem drainase kota dan penanganan banjir yang komprehensif dengan memperhatikan tata ruang, topografi, drainase alam yang sudah ada, pembuatan waduk/kolam penampung air, sumur resapan serta pemanfaatan daerah rawa dan gambut yang terencana dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan diharapkan tahun 2025 Kota Pekanbaru bebas banjir. Salah satu kerugian yang dialami akibat banjir di Kota Pekanbaru berbagai infrastruktur di Kota Pekanbaru sudah rusak, terutama jalan-jalan yang kerap digenangi air saat hujan lebat.

Untuk permasalahan banjir perlu adanya keselarasan perencanaan pembangunan dan penanggulangan dari pemerintah Kota Pekanbaru terhadap RPJP pemerintah Kota Pekanbaru yang terwujud dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk pemerintah daerah/kota dan Rencana strategis (Renstra) untuk Organisasi Perangkat Daerah lalu pertahunnya dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Renja (Rencana Kerja). Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru memiliki program untuk pencegahan banjir. Dalam penyusunan rencana pembangunan pencegahan banjir yaitu Dinas PUPR Kota Pekanbaru bersama DPRD dan Bappeda Kota Pekanbaru sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yakni

Bapedda turut andil dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

Selain curah hujan yang tinggi, drainase yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan adanya sumbatan sebagai penyebab banjir, penyebab lainnya di Kota Pekanbaru tidak memiliki *masterplan* untuk penanganan banjir (Datariau.com, 29 November 2019). Masalah banjir tahunan yang terjadi di Kota Pekanbaru juga harus memperhatikan tingkat kedalaman. Yaitu drainase tidak boleh lebih tinggi daripada jalan. Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan (Dosen UIR) menilai permasalahan banjir di Pekanbaru sebenarnya tidak sesulit seperti yang dikatakan Pemerintah Kota Pekanbaru. seperti yang dikatakan Pemerintah Kota Pekanbaru. Solusinya adalah hanya dengan membuat *masterplan* yang tepat dan tertata kelola yang tampak hulu dan hilir, kemana arah mata panah air, air mengalir dari arah mana kearah mana (Cakaplah.com, 18 Juli 2018).

Maka berdasarkan fenomena diatas perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan pencegahan banjir khususnya pemerintah Kota Pekanbaru perlu membuat rencana pembangunan yang tepat sasaran, sinkron dan visioner. Sehingga pembuatan drainase yang merupakan aliran pembuangan air menuju sungai tidak terjadi kendala maupun pembangunan lainnya seperti waduk, turap dan lain sebagainya. Maka dengan ini penulis tertarik meneliti perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pencegahan banjir di Kota Pekanbaru khususnya tahun 2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas jelas bahwa perencanaan sangatlah penting dalam setiap kebijakan, program maupun kegiatan agar rencana yang telah ditetapkan tidak terjadi kendala, kesalahan dan penyelewengan. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pencegahan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2019?
2. Apa Faktor penghambat Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pencegahan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, mengetahui dan mendeskripsikan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pencegahan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2019.

D. KERANGKA TEORI

1. Perencanaan

George R. Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu:

- 1) *Planning* (Perencanaan), suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian), proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
- 3) *Actuating* (Penggerakan), proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar bekerja keras dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan efektif dan efisien.
- 4) *Controlling* (Pengawasan), proses melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana yang

telah dibuat sebelumnya (Salam, 2004: 13).

Dengan defenisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur: (1) berhubungan dengan hari depan, (2) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Kunarjo, 2002: 14). Siagian berpendapat bahwa: "Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1989: 50). Kaufman sebagaimana dikutip Harjanto, perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai (Setiadi, 2014: 1.6-1.7).

Dalam kaitannya dengan teori perencanaan, perlu disampaikan mengenai ciri-ciri penting dari pembangunan yang terencana. Ciri-ciri tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Masalah yang dihadapi dalam pembangunan dapat ditunjukkan dengan jelas.
- 2) Tujuan dan sasaran yang dicapai dalam pembangunan dapat dinyatakan dengan jelas.
- 3) Tahapan untuk mencapai tujuan dapat diutarakan dengan jelas.
- 4) Prosedur kerjanya jelas.
- 5) Arah pembangunannya jelas (Setiadi, 2014: 1.10)

2. Perencanaan Pembangunan

Amirullah dan Haris Budiyo mengemukakan perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya (Amirullah & Budiyo, 2004: 7). Lebih lanjut mereka menjelaskan tahapan-tahapan dari perencanaan yang terstruktur dalam konteks organisasi yaitu:

- 1) Proses;
- 2) Penetapan tujuan dan sasaran;
- 3) Pemilihan tindakan;
- 4) Mengkaji cara terbaik;
- 5) Tujuan.

Menurut Tjokroamidjojo proses perencanaan terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana ini meliputi unsur-unsur, yakni:

1. Tinjauan keadaan merupakan kegiatan berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya. disini diusahakan dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, sejauh mana kemajuan telah dicapai, hambatan-hambatan dan potensi-potensi yang ada.
 2. *Forecasting* (Peramalan) yaitu merupakan perkiraan keadaan masa yang akan datang.
 3. Penetapan tujuan dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan tersebut.
 4. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. suatu *policy* mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan, yang agar lebih operasional rencana kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasarkan pemilihan alternatif yang terbaik, yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan *opportunity cost* dan skala prioritas.
 5. Persetujuan rencana.
- ### 2. Penyusunan Program Rencana
- Merupakan tahap perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan-tujuan atau sasaran, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan tersebut.

3. Pelaksanaan Rencana
Dalam tahap ini merupakan tahap untuk melaksanakan rencana dimana perlu dipertimbangkan juga kegiatan-kegiatan pemeliharaan. kebijaksanaan-kebijaksanaan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian
4. Pengawasan
Adapun tujuan pengawasan ini adalah:
 1. Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencananya.
 2. Jika terdapat penyimpangan maka perlu untuk diketahui berapa jauh penyimpangan tersebut dan dicari penyebabnya.
 3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut untuk itu diperlukan suatu sistem *monitoring* dengan pelaporan dan *feedback* daripada pelaksanaan rencana.
5. Evaluasi
Tahap ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan. selain itu, tahap ini dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dengan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya dan penyesuaian terhadap perencanaan itu sendiri (Tjokoramidjojo, 1992: 57-60).

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Meoleong, 2006: 4). Jenis

penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Sugiono, 2005: 2).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa instansi tersebut mempunyai wewenang dalam perencanaan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama subyek penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengatamai sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya (Nazir, 2005: 23). Data primer yang dibutuhkan yaitu mengenai perencanaan dan faktor penghambat pembangunan dalam pencegahan banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui dokumen dan sifatnya melengkapi dan penunjang data primer (Sugiono, 2012: 7). Data sekunder yang dibutuhkan adalah RPJM Kota Pekanbaru, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017-2022 dan data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, dan bahan bacaan lainnya.

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	DPRD Kota Pekanbaru	3
2	Badan Perencanaan Daerah Kota Pekanbaru	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	5
Total		9

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan langkah-langkah: 1) menyiapkan data; 2) *Editing*; 3) *Coding*; Manipulasi data; 4) Manipulasi data; 5) Analisis dan interpretasi data (Creswell, 2016: 264-268).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk pencegahan permasalahan banjir perlu disiapkan dengan baik

perencanaan dan penganggarannya. Terlebih dampak dari banjir ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun infrastruktur kota. Oleh karena itu, pengungkapan fenomena perencanaan pembangunan banjir di Kota Pekanbaru dikaji dari sudut pandang perencanaan pembangunan, penulis menggunakan teori Trjokroamidjojo. Menurut Tjokroamidjojo proses perencanaan terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana ini meliputi unsur-unsur, yaitu:

a) Tinjauan Keadaan

Masalah pokok yang diharapkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan pencegahan banjir adalah:

- 1) Pengguna lahan yang tidak tepat, banyak pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak tepat. Wilayah yang dahulu tempat air berkumpul dan posisinya lebih rendah dibangun perumahan sehingga terjadinya banjir di wilayah tersebut. Contohnya perumahan witayu di Jl. Nelayan dan perumahan Bintungan di Jl. Cipta Karya Kota Pekanbaru.
- 2) Sistem pengairan yang tidak jelas. Untuk di daerah cekungan, terdapat aliran yang ke samping jalan, dan itu tertutup bangunan atau tanahnya sudah dimiliki orang atau kepemilikan, tentu tidak bisa membangun saluran untuk membebaskan air cekungan tersebut. Karena membebaskan lahan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak kecil sehingga masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat terlebih anggaran kota Pemerintah Kota Pekanbaru yang terbatas.
- 3) Topografi di Kota Pekanbaru selain datar, seperti kuali besar dan kecil. Kuali besar yang menjadi masalah pengembangan air, sebab kuali besar yang menjadi tempat berkumpulnya air

tidak bisa dialirkan ke sungai disebabkan elevasinya lebih rendah daripada Sungai Siak atau sungai yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk penanganan tersebut dibutuhkan waduk untuk tempat penampungan air, masalahnya dana yang terbatas sehingga masalah tersebut belum dapat teratasi sepenuhnya. Seperti di jalan Lembah Raya, jalan Lobak dan jalan Srikandi.

- 4) Kurangnya resapan. Banyaknya pembangunan di Kota Pekanbaru tidak diiringi dengan perilaku taat hukum. Peneliti-peneliti di Kota Pekanbaru telah banyak mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Salah satunya hasil penelitian dari Arfan Dilando, dkk studi kasus di Kecamatan Rumbai Pesisir yang menyatakan bahwa implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan belum terlaksana dengan baik. Masih banyak dari poin-poin pada Perda tersebut yang masih diabaikan dalam pembangunan perumahan atau bangunan rumah dan toko yang dibangun oleh pengembang (*developer*) ataupun pembangunan yang didirikan oleh pribadi (Dilando, dkk, Jurnal Ilmu Administrasi, 2020: 58). Bukan hanya di Kecamatan Rumbai Pesisir saja, secara umum di Kota Pekanbaru Perda tersebut belum terlaksana dengan baik.
- 5) *Master Plan* pencegahan banjir belum ada. Disebabkan *master plan* pencegahan banjir belum ada arah penanganan banjir menjadi tidak jelas. Salah satu tujuan *Master Plan*, agar masyarakat tahu, pembagian wewenang pemerintah. Sehingga dengan adanya *Master Plan* ini, maka masyarakat tahu kemana harus menyampaikan keluhan/pengaduan.
- 6) Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemerintah

Provinsi Riau. DPRD dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru dengan DPRD Kota Pekanbaru belum terjadi kerjasama dan koordinasi terkait masalah penanganan banjir dikarenakan masalah politik dalam pembangunan. Selain itu kurangnya koordinasi antara pemerintah Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Kampar terkait lanjutan perencanaan pembangunan pencegahan banjir. Kegiatan tersebut hanya berlangsung sampai perbatasan Kabupaten Kampar dan tidak dilanjutkan dengan pembangunan lanjutan dari Kabupaten Kampar. Seperti di perbatasan Pekanbaru–Kampar tepatnya di Jalan Datuk Tunggul. Jalan Datuk Tunggul tersebut salah satu lokasi titik banjir di Kota Pekanbaru. Banjir tersebut disebabkan oleh lebar saluran *drainase* tidak merata. Saluran *drainase* Kota Pekanbaru yang dibangun di Jalan Datuk Tunggul selebar 3 meter, sedangkan saluran *drainase* Kabupaten Kampar selebar 1 meter. Kondisi saluran *drainase* yang tidak merata tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Kampar. Bukan hanya Kabupaten Kampar aja perbatasan Pekanbaru Kota seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan juga berdampak pada perencanaan pembangunan banjir. Seharusnya Pemerintah Provinsi Riau turut andil dalam upaya koordinasi tersebut sehingga masalah pokok dalam perencanaan pencegahan banjir teratasi dengan baik.

Kemudian sejauh mana tujuan telah tercapai pada tahun 2018 tidak ada pembangunan terkhusus pada pembangunan pencegahan banjir hanya saja untuk pembersihan aliran drainase lingkungan kota Pekanbaru menjadi wewenang Pemerintah Kota Pekanbaru. Instansi yang bertugas tersebut adalah

pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yakni ‘pasukan kuning’. ‘Pasukan kuning’ Kota Pekanbaru juga sering dikritisi sebab kinerjanya lamban, sebab ketika terjadi banjir ‘pasukan kuning’ bergerak mengatasi padahal jika ada peninjauan sebelum terjadinya banjir itu lebih baik sehingga titik genangan dapat teratasi dengan baik. Kemudian dengan keterbatasan anggaran tahun 2018 maka perencanaan pembangunan pencegahan banjir dilanjuti tahun 2019 yang sebelumnya belum tercapai sasaran yaitu mengurai titik lokasi terjadinya banjir. Berikut persentase penyelesaian titik banjir di Kota Pekanbaru tahun 2017 dan 2018:

Tabel 4
Persentase Penyelesaian Titik Rawan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

Sumber: LKJiP Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2017 Dinas PUPR Kota Pekanbaru menyelesaikan titik rawan banjir di Kota Pekanbaru berjumlah 7 titik penyelesaian. Sedangkan tahun 2018 berjumlah 8 titik

Tahun	Jumlah Titik Banjir	Penyelesaian	Persentase Titik Banjir Terselesaikan
2017	35	7	20%
2018	37	8	22%

penyelesaian. Jumlah peningkatan titik rawan banjir di Kota Pekanbaru dengan jumlah titik penyelesaian tidak sebanding dan tidak terlalu berdampak signifikan. Artinya, penyelesaian masalah banjir di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum maksimal ada perencanaan pembangunan pencegahan banjir tahun 2017 dan tahun 2018.

Hambatan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan pencegahan banjir dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Cuaca, dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan cuaca menjadi musuh dalam pembangunan, sebab dalam perencanaan pembangunan cuaca yang buruk mengakibatkan mempengaruhi kualitas pembangunan jika tetap dilanjutkan. Akibatnya habis waktu untuk menunggu cuaca membaik padahal ada jadwal yang harus ditergetkan dalam penyelesaian pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tercapai atau tidak sesuai target mengakibatkan tundanya pembangunan untuk tahun berjalan. Sehingga anggaran memang menjadi faktor penting kesuksesan pembangunan.
- 2) Penyumbatan *Drainase*. Penyumbatan diakibatkan oleh sampah yang dibuang sembarangan menjadi tersumbatnya parit dan air yang mengalir melimpah di titik tertentu. Selain itu lumpur yang menumpuk juga dapat mengakibatkan parit tersumbat. Sehingga dalam rencana pemeliharaan sampah dan lumpur ini menyebabkan kegiatan pemeliharaan memakan tenaga, biaya dan waktu untuk membersihkan *drainase* tersebut.
- 3) Perilaku masyarakat dan pengguna lahan. Masyarakat yang membangun ruko di sekitar *drainase* membuat jembatan untuk jalur ke rukonya, jembatan yang dibangun tidak sesuai standar sehingga mengalami penghambatan saluran air yang mengalir. Kemudian pembangunan *drainase* yang dilakukan di depan Ruko selaku pengguna lahan kebanyakan keberatan ketika hendak dibangun *drainase*. Hal ini disebabkan pembangunan *drainase* yang membutuhkan waktu yang lama dan itu mengganggu usaha mereka. Kemudian kurangnya disiplin masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama pada *drainase* sehingga tidak lancarnya aliran *drainase* tersebut.
- 4) *Drainase* yang lebih tinggi daripada badan jalan, hal ini juga disebabkan

tumpukan tanah yang menghalangi sehingga tanah itu lebih tinggi daripada jalan yang mengakibatkan terhambatnya air yang di jalan mengalir ke saluran *drainase*. Kemudian untuk kondisi *drainase* yang lebih daripada badan jalan yang sengaja dibangun namun dibuat lubang di pinggir *drainase* untuk menyalurkan air dari jalan ke *drainase* tersumbat disebabkan tumpukan tanah maupun sampah, sehingga air tidak dapat mengalir ke *drainase*.

Potensi yang ada dalam perencanaan pembangunan pencegahan banjir dapat disimpulkan berdasarkan perilaku masyarakat yang taat hukum, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang sumur resapan salah satu manfaatnya adalah mencegah terjadinya banjir. Perda inilah yang belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat di Pekanbaru. Kemudian ruko-ruko dan perumahan yang memperhatikan kondisi air atau aliran sungainya. Jika masyarakat melaksanakan Perda tentang Sumur Resapan dan memperhatikan kondisi air pada saluran air sungai atau disekitarnya akan mencegah terjadinya banjir.

Terakhir yang menjadi potensinya adalah asas gotong royong, dengan asas gotong royong membersihkan saluran air di setiap daerah perRT, RW ataupun kelurahan yang dilaksanakan rutin akan efektif dalam upaya pencegahan terjadinya banjir di Kota Pekanbaru.

b) *Forecasting* (Peramalan)

Terkait *forecasting* (peramalan) dalam rencana pembangunan pencegahan banjir dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan perkiraan perkembangan keadaan pada masa yang akan dilalui. Perkiraan tersebut dapat disimpulkan:

1. Untuk pembangunan jangka pendek yaitu 1 tahun dalam *forecasting*

sebagai upaya lancarnya pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru khusus pada tahun 2019 melakukan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan pemeliharaan sebagai bentuk antisipasi seperti sedimentasi, sampah yang menghambat saluran *drainase* sebagai bentuk penghambat kesuksesan pencegahan banjir.

2. Kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, kondisi geografis Kota Pekanbaru seperti datar dan terdapat kuali besar dan kuali kecil. Kemudian daratan tersebut kondisinya lebih rendah daripada sungai yang ada di kota Pekanbaru, sehingga tidak bisa dialirkan ke sungai. Kajian-kajian seperti ini telah diantisipasi untuk pembangunan secara bertahap dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran tersebut. Oleh karena itu kedepannya dibangun waduk-waduk atau danau kecil setiap kecamatan untuk menampung air sementara sebagai upaya mengatasi banjir di Kota Pekanbaru.

3. *Master Plan* sebagai upaya penting dalam pembangunan pencegahan banjir. Arah penanganan banjir yang tidak jelas disebabkan tidak adanya peta saluran *drainase* di Kota Pekanbaru. Peta tersebut dibutuhkan untuk mengarahkan aliran air seharusnya mengalir dengan terlebih dahulu membuat titik-titik rawan banjir. Selain itu, *Master Plan* tersebut juga berfungsi agar masyarakat mengetahui kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam penanggulangan banjir.

Forecasting pembangunan pencegahan banjir telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Hanya saja keterbatasan anggaran yang menjadi penghalang Dinas PUPR berbuat maksimal dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Pekanbaru.

c) Identifikasi Kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana

Identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana dalam perencanaan pembangunan pencegahan yaitu adanya program pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kemudian seksi O/P melakukan normalisasi/pembersihan saluran dan sungai/anak sungai secara berkala di wilayah Kota Pekanbaru, dan melakukan pemeliharaan jembatan sebagai upaya memperlancar aliran *drainase*. Melakukan rehabilitasi/perbaikan pada bangunan pengendali banjir yang mengalami kerusakan. Perencanaan banjir juga mempertimbangkan skala prioritas, yaitu lebih memprioritaskan wilayah yang *urgent* dan prioritaskan parit yang menuju parit induk, primer dan sekunder.

d) Persetujuan Rencana

Persetujuan rencana yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pencegahan banjir persetujuan perencanaan pembangunan dilakukan bersama Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku instansi teknis, Bappeda dan DPRD selaku pengawas dan penganggaran sesuai dengan fungsi instansi tersebut. Sebelum persetujuan rencana pembangunan pencegahan banjir dilakukan terdapat berbagai kepentingan antar instansi terhadap penyelesaian persoalan banjir di Kota Pekanbaru. Dikarenakan keterbatasan anggaran maka dipilihlah skala prioritas pembangunan sebagai upaya pencegahan banjir. Adapun persetujuan rencana pencegahan banjir Kota Pekanbaru tahun

2019 adalah program pembangunan turap/talud/brojong di wilayah barat I dan barat II, kemudian program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan normalisasi saluran sungai dan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai, serta program rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

2. Penyusunan Program Rencana

Penyusunan program rencana disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama pihak terkait yang ditunjuk seperti konsultan perencanaan dan para ahli tentunya, kemudian DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Bappeda. Berikut program yang disusun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yakni Dinas PUPR dan DPRD Kota Pekanbaru dalam pencegahan banjir di Kota Pekanbaru di halaman selanjutnya:

3. Pelaksanaan Rencana

Pelaksanaan rencana pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kota Pekanbaru memiliki kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi. Tentu wajar dalam ada kegiatan pemeliharaan dalam rencana pencegahan banjir yaitu pembersihan pada *drainase* agar air yang mengalir pada *drainase* dapat berjalan dengan lancar, kemudian jika ada bangunan yang roboh, atau bermasalah maka segera akan diperbaiki. Ada kriteria tertentu atau teruji kelayakan pembangunan terlebih dahulu oleh pekerja proyek, sehingga masa pemeliharaan dan kualitas pembangunan menjadi tanggung jawab pekerja proyek (Kontraktor). Kemudian dalam pelaksanaan rencana pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru dapat berubah jika ada perubahan kebijakan dari instansi atas yang memungkinkan terjadinya perubahan. Pada rencana pembangunan tahun 2019 khusus pada

rencana pembangunan pencegahan banjir tidak terjadi perubahan kebijakan.

Aktor dalam pembersihan *drainase* yakni pihak yang ditunjuk oleh Dinas

Tabel 5
Program dan Kegiatan dalam Pencegahan Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Anggaran (Rp)
1	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong			3.691.442.700
a	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Brojong	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	4 Dok	606.676.700
b	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Brojong Wilayah Barat I (Barat)	Panjang Leoning yang akan dibangun	835 Meter	1.356.993.300
c	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Brojong Wilayah Barat II (Timur)	Panjang Leoning yang akan dibangun	3000 Meter	1.727.727.700
2	Program Pengembangan dan Pengeolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya			8.543.038.920
a	Panjang Normalisasi Sungai Dan Anak Sungai	Panjang Normalisasi sungai dan anak sungai	110000	3.040.415.720
b	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai, Saluran Sekunder, Primer Dalam Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sungai, saluran sekunder, primer dalam Kota Pekanbaru	1 Tahun	5.502.623.200
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rehabilitas jembatan	1 Tahun	1.520.753.579

Sumber: LKJiP Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 2019.

PUPR Kota Pekanbaru yaitu ‘pasukan kuning’ tergolong lambat dalam menjalankan tugasnya. Sebab pembersihan dilakukan pada musim hujan sehingga terjadi kesulitan dalam proses pembersihan. Seharusnya pembersihan tersebut dilakukan pada musim kemarau agar memudahkan pembersihan saluran *drainase* tersebut. Berikut data lokasi titik rawan banjir di Pekanbaru tahun 2019.

Berdasarkan tabel 15 dan 16 di bawah lokasi titik rawan banjir di Kota Pekanbaru di nominasi di Kecamatan Tampan dengan jumlah 13 titik rawan banjir, sedangkan terendah ditempati oleh Kecamatan Payung Sekaki, Suka Jadi, dan Rumbai Pesisir dengan jumlah 13 titik rawan banjir. Sedangkan penyelesaian lokasi titik rawan banjir oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru adalah 12 titik. Hal ini tentunya belum maksimal dalam penyelesaian masalah banjir di Kota Pekanbaru yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak maksimal penyelesaian pencegahan banjir di Kota Pekanbaru tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan rasionalisasi anggaran.

Tabel 6
Lokasi Titik Rawan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2019

Sumber: Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 2020.

No	Kecamatan	Jumlah Titik Rawan Banjir
1	Tampan	11
2	Marpoyan Damai	10
3	Pekanbaru Kota	5
5	Bukit Raya	6
6	Rumbai	2
7	Senapelan	1
8	Tenayan Raya	2
9	Payung Sekaki	1
10	Rumbai Pesisir	1
Total		39

Sedangkan untuk penyelesaian titik rawan banjir di Kota Pekanbaru oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru dicantumkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7
Persentase Penyelesaian Titik Rawan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2019

Tahun	Jumlah Titik Banjir	Penyelesaian	Persentase Titik Banjir terselesaikan
2019	39	12	30,76%

Sumber: LKJiP Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 2020

4. Pengawasan

Adapun tujuan pengawasan ini adalah:

- 1) Agar Pelaksanaan Berjalan Sesuai dengan Rencananya

Dinas PUPR Kota Pekanbaru menjalin hubungan dengan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan pembangunan terutama perencanaan pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru. Kemudian dari pihak DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang menangani persoalan banjir di Kota Pekanbaru.

- 2) Jika Terdapat Penyimpangan maka Perlu Untuk Diketahui Berapa Jauh Penyimpangan Tersebut dan Dicari Penyebabnya

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kemudian terdapat berbagai penyimpangan dalam pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan konteks penelitian penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru adalah terdapat oknum kontraktor dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan *space* pekerjaannya, seperti kesalahan dalam merakit besi dan

pemasangan mal. Penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yaitu kurang kompetennya pekerja dalam membaca gambar dan akan berpengaruh terhadap mutu bangunan.

Selanjutnya mengenai kegiatan pemeliharaan saluran *drainase* primer dan sekunder dan normalisasi anak sungai. Sebagaimana yang dijelaskan petugas rehabilitasi saluran *drainase* primer dan sekunder dinilai lamban. Petugas melakukan rehabilitasi ketika musim hujan, sehingga menyulitkan dalam pekerjaan yang seharusnya dilakukan pada musim kemarau atau tidak hujan agar memudahkan dalam pekerjaan. Laporan tersebut sudah masuk ke DPRD Kota Pekanbaru untuk dievaluasi untuk perbaikan kedepannya.

- 3) Dilakukan Tindakan Korektif Terhadap Penyimpangan Tersebut Untuk itu Diperlukan Suatu Sistem Monitoring dengan Pelaporan dan *Feedback* Daripada Pelaksanaan Rencana

Adanya tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pencegahan banjir dengan cara memanggil dinas yang bertanggung jawab, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang maupun konsultan pengawas melakukan pengawasan rutin, dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru.

5. Evaluasi

Dalam perencanaan pembangunan pencegahan banjir adanya evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya dapat disimpulkan adanya evaluasi perencanaan pembangunan pencegahan banjir dari perencanaan sebelumnya dalam bentuk *revidesign*. Kemudian selalu mendiskusikan hasil dari perencanaan pembangunan pencegahan

banjir, agar tahu langkah selanjutnya untuk perencanaan selanjutnya dan tahu analisisnya seperti apa. Dan selama proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pencegahan banjir, bidang sumber daya air melakukan rapat evaluasi bersama pelaksana pembangunan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencegahan banjir Kota Pekanbaru tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dan hambatan dalam tahap penyusunan rencana seperti seperti pengguna lahan yang tidak tepat, sistem pengairan yang tidak jelas, kurangnya waduk untuk tempat penampungan air, kurangnya sumur resapan sebagai upaya penanggulangan banjir, *Master plan* pembangunan penanganan banjir belum ada, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk penyelesaian lokasi titik banjir di wilayah perbatasan, pembangunan tahun sebelumnya belum maksimal, faktor alam yaitu cuaca sebagai penghambat proses pembangunan, penyumbatan *drainase*, perilaku masyarakat yang tidak taat hukum dan membuang sampah sembarangan. Sehingga dalam pelaksanaan rencana pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru tahun 2019 tidak maksimal.

H. SARAN

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini tentang perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Banjir di Kota Pekanbaru tahun 2019 ini adalah:

1. Bagi masyarakat harus mendukung program dan kegiatan dari pemerintah sebagai upaya pencegahan banjir. Pemerintah kesulitan melakukan pembersihan saluran akibat sampah yang

- ditimbulkan dari masyarakat. Buanglah sampah yang telah disediakan oleh pemerintah, dan jadilah masyarakat yang taat hukum.
2. Bagi pemerintah, pemerintah harus segera menyelesaikan *Master Plan* pencegahan banjir di Kota Pekanbaru. Kemudian terus melakukan tindakan seperti sosialisasi, bermitra dengan pihak lainnya agar masyarakat mengikuti anjuran dan peraturan dari pemerintah, terutama meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan banjir dan memudahkan kedepannya untuk pembangunan pencegahan banjir di Kota Pekanbaru.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiyono, Haris & Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenadan Media Group.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Komparatif, dan Campuran*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djembatan.
- Setiadi, Hafid. 2014. *Teori Perencanaan. In: Dasar-Dasar Teori Perencanaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- S.P, Siagian. 1989. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjkroamidjojo, Bintoro. 1992. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

Skripsi:

- Wahyudha, Rizal. 2018. *Implementasi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi S1. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Fakultas Dakwah. Ilmu Komunikasi.

Jurnal:

- Dilando Arfan, Febri Yuliani, dan Adianto. 1 Juli 2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 16. Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

.Website:

- Datariau.com.
<https://datariau.com/legislatif/DPRD-Pertanyakan-Masterplan-Penanganan-Banjir-Kota-Pekanbaru> (Diakses 29 November 2019)
- Mardianto, Rico. Riauonline. co.id.
<https://riauonline.co.id/riau/read/2019/06/16/mulai-dari-persoalan-parit-semenisasi-hingga-sampah-jadi-penyebab-banjir-pekanbaru> (Diakses 16 Juni 2019)
- Riaupagi.com.
<https://riaupagi.com/2018/11/12/3-kecamatan-di-pekanbaru-rawan-banjir> (Diakses 12 November 2019)

Riauterkini.com.

<https://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=129131&judul=Nanti-Malam,-Yose-Rizal-dan-Pengurus-DKR-Dilantik>. (Diakses 31 Desember 2017)

Romadhoni, Anggi. Antaranews.com.

<https://antaranews.com/amp/berita/923108/banjir-jadi-persoalan-serius-pekanbaru-yang-segera-diatasi>, (Diakses 22 Juni 2019)

Yonela, Satria. Cakaplah.com.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/07/16/pengamat-solusi-banjir-pekanbaru-adalah-masterplan-yang-tepat#sthash.L9M4HTid.dpbs> (Diakses 18 Juli 2018)